

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA  
(APBDES) TERHADAP PENANGANAN *STUNTING* DI DESA PAYA BESAR  
KECAMATAN BATU BENAWA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister (S2)**

**Pada Program Studi Magister Administrasi Publik**

**JAYADI  
NIM. 2320419310053**



Oleh :

Jayadi

**NIM. 2320419310053**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS  
LAMBUNG MANGKURAT (ULM)  
BANAJARMASIN  
2025**

**PENGESAHAN TESIS**

Judul : Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Penanganan *Stunting* di Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

Nama : Jayadi

NIM : 2320419310053

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Disetujui Komisi Penguji



Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si  
Ketua




Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, M.PA  
Anggota



Dr. H. M. Nur Iman Ridwan, S.Sos., M.Si  
Anggota


Mengetahui

Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik



Dr. H. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si  
NIP. 19740307 200212 1 003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Budi Suryadi, M.Si  
NIP. 19730122 199802 1 001

Tahun Lulus : 2025

Tanggal Wisuda :

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulisan tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Penanganan Stunting di desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah” dapat diselesaikan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan diri penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si selaku Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Asmu’I, M. Si selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji I, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, bimbingan, koreksi dan arahan kepada penulis dalam penulisan dan perbaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Riduan Syafari, M. PA selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan berharga bagi penulis dalam perbaikan tesis ini.

6. Bapak H. M. Nur Iman Riswan, S. Sos, M. Si selaku Dosen Penguji III yang juga telah banyak memberikan dan bimbingan serta masukan untuk perbaikan tesis ini
7. Seluruh dosen pengajar yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat
8. Seluruh staf dan pelaksana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan membantu penulis dalam urusan administrasi dan lain-lain, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Seluruh responden, informan dan narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penulis, serta memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis, sebagai bahan penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa sepejuangan Angkatan XXXVI Banjarmasin Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya para mahasiswa dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah berkenan berbagi kebersamaan dalam suka dan duka, selama menjalani perkuliahan S2 ini.
11. Istri, anak dan seluruh keluarga yang selalu memotivasi dan mendukung penulis dalam menempuh kuliah pendidikan Magister Administrasi Publik di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya, penulis berdoa dan memohon agar semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama ini, mendapatkan limpahan rahmat dan

pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan nantinya.

Banjarmasin, Juni 2025

Penulis,

**J a y a d i**

## ABSTRAK

Jayadi, 2320419310053, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penanganan *stunting* di Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa. Meskipun proses perencanaan program telah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2024, penelitian ini menemukan bahwa implementasi di lapangan kurang optimal dari tujuan yang diharapkan. Hal ini berakar pada sumber daya yang dianggap tidak memadai, yang memicu penolakan dari para pelaksana. Sikap ini dieksekusi dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem komunikasi dan struktur birokrasi yang tidak terintegrasi, sehingga program hanya berjalan secara administratif untuk memenuhi pagu anggaran tanpa memberikan dampak dan efektivitas yang nyata.

Faktor-faktor menghambat kurang optimalnya dari implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam penanganan *stunting* adalah sebagai (1) anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam penanganan *stunting* masih kurang (2) sumber daya manusia yang menjadi pelaksana penanganan *stunting* yang kurang profesional (3) sosialisasi yang masih kurang dan (4) komitmen pelaksana yang masih lemah.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan (1) memprioritaskan anggaran, sehingga penanganan *stunting* dijadikan program utama APBDes melalui musdes dan rembuk *stunting*, mengoptimalkan dan berupaya mencari dana lain dengan mengkonvergensi program desa serta menggandeng pihak ketiga. (2) melaksanakan peningkatan kapasitas dan pendampingan dengan menyelenggarakan pelatihan rutin teknis berkelanjutan bagi kader. (3) memperluas sosialisasi dengan memanfaatkan semua media secara langsung, digital, forum desa dan sasaran yang beragam dengan membuat materi yang mudah dipahami, praktis, dan visual menarik. (4) memperkuat komitmen kepemimpinan dengan melibatkan kepala desa dan seluruh perangkat serta lembaga desa dalam rembuk *stunting* dan pakta integritas dengan memasukkan *stunting* dalam Perdes, lakukan monitoring dan evaluasi rutin oleh Pemerintah desa.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, APBDes, Penanganan *Stunting*, Koordinasi Lintas Sektor, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Paya Besar.

## **ABSTRACT**

*Jayadi, 2320419310053, This study aims to analyze the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) policy in addressing stunting in Paya Besar village, Batu Benawa district. Although the program planning process complies with Regent Regulation No. 7 of 2024, this research found that its on-the-ground implementation was suboptimal in achieving the expected objectives. This issue is rooted in inadequate resources, which led to resistance from the implementers. This resistance was manifested by exploiting weaknesses in the communication system and a non-integrated bureaucratic structure, resulting in the program being executed merely for administrative compliance to meet budget ceilings, without delivering tangible impact or effectiveness.*

*The factors hindering the optimal implementation of the APBDes policy for stunting handling are: (1) an insufficient village revenue and expenditure budget (APBDes) for stunting programs; (2) a lack of professionalism among the human resources responsible for implementing stunting interventions; (3) inadequate socialization; and (4) weak commitment from the implementers.*

*Therefore, this study recommends: (1) prioritizing the budget by making stunting handling a primary program in the APBDes through village deliberations (musdes) and stunting-specific consultations (rembuk stunting), while also optimizing and seeking alternative funding by converging village programs and collaborating with third parties; (2) implementing capacity building and mentorship through regular and sustainable technical training for cadres; (3) expanding socialization efforts by utilizing all available media direct, digital, and village forums with diverse targets, and by creating materials that are easy to understand, practical, and visually engaging; (4) strengthening leadership commitment by involving the village head, all village officials, and local institutions in stunting consultations and an integrity pact, integrating stunting into village Regulations (Perdes), and ensuring regular monitoring and evaluation by the village government.*

*Keywords: Policy Implementation, APBDes, Stunting Handling, Cross-Sectoral Coordination, Community Empowerment, Paya Besar Village.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1 Manfaat Patik.....	7
1.5.2 Manfaat Akademik.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teori.....	12
2.2.1 Admistrasi Publik.....	12
2.2.1.1 Pengertian Administrasi Publik.....	12
2.2.1.2 Teori Administrasi Publik Menurut Para Ahli.....	13
2.2.2 Kebijakan Publik.....	17
2.2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	17
2.2.2.2 Proses Kebijakan.....	19
2.2.3 Implementasi Kebijakan.....	20
2.2.3.1 Konsep Implementasi Kebijakan.....	32
2.2.3.2 Model Implementasi Kebijakan.....	34
2.2.3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebijakan	
2.2.4 <i>Stunting</i> .....	20

2.2.4.1 Pengertian <i>Stunting</i> .....	26
2.2.4.2 Penyebab <i>Stunting</i> .....	28
2.2.4.3 Upaya Pencegahan <i>Stunting</i> .....	32
2.2.4.4 Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan <i>Stunting</i> .....	37
2.3 Kerangka Pemikiran.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	43
3.2 Tipe Penelitian.....	43
3.3 Lokasi Penelitian .....	44
3.5 Infomen Penelitian .....	44
3.6 Instrumen Penelitian .....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Analisis Data .....	46
3.8 Validasi Data.....	47
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Sejarah Singkat Desa Paya Besar .....	49
4.2 Kondisi Geografis.....	50
4.3 Kondisi Demografis dan Ekonomi Desa Paya Besar.....	50
4.3.1 Jumlah Penduduk.....	51
4.3.2 Komposisi Usia Penduduk .....	51
4.3.3 Penduduk Bersarkan Mata Pencaharian.....	52
4.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	53
4.4 Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	55
4.4.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan .....	55
4.4.2 Pemerintahan Desa .....	56
4.4.3 Kedudukan dan Wewenang Pembakal.....	57
4.4.4 Hak dan Kewajiban Pembakal .....	57
4.4.5 Tugas dan Fungsi Perangkat Desa.....	59
4.4.6 Badan Permusyawaratan Desa .....	61
4.4.7 Tugas dan Fungsi Puskesmas .....	63
4.4.8 Tugas dan Fungsi Pusyandu.....	64
4.4.9 Peran dan Fungsi PLKB.....	65

4.4.10 Peran dan Tugas Tim Pendamping Keluarga (TPK).....	66
4.4.11 Tugas dan Fungsi Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .....	66
4.4.12 Tugas dan Fungsi Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .....	67
4.4.13 Tugas dan Fungsi Bidan Desa .....	69
4.2.14 Tugas Kader Keluarga/ KB Desa.....	71
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
5.1 Hasil Penelitian.....	73
5.1.1 Implementasi Kebijakan (APBDes) dalam Penanganan <i>Stunting</i> di Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa.....	73
5.1.1.1 Perencanaan .....	73
5.1.1.2 Pelaksanaan.....	75
5.1.1.3 Evaluasi .....	81
5.1.2 Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kebijakan APBDes untuk penanganan <i>stunting</i> di desa Paya Besar.....	83
5.2 Pembahasan .....	89
5.2 Implementasi Kebijakan (APBDes) dalam Penanganan <i>Stunting</i> di Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa .....	89
5.2.1.1 Komunikasi.....	88
5.2.1.2 Sumber Daya .....	89
5.2.1.3 Desposisi.....	94
5.2.1.3 Struktur Berokrasi.....	95
5.2.2 Faktor Penghambat Implementasi kebijakan APBDes untuk penanganan Di Desa Paya Besar.....	99
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
6.1 Kesimpulan.....	101
6.2 Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin	39
Tabel 4.2	Kompusisi Usia Penduduk	40
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	41
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41

## DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	Kerangka Konsep Pemikiran	31
Gambar 4.1	Kantor Desa Paya Besar	38
Gambar 4.2	Kegiatan Pusyandu di desa Paya Besar	75
Gambar 5.1	Kegiatan PMT	90
Gambar 5.2	Menu Stunting Anak dan Balita	91